

Judul : Pemerintah Larang Thrifting Sudah Saatnya, Tekstil Lokal Kembali Bangkit
Tanggal : Rabu, 05 November 2025
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Pemerintah Larang Thrifting Sudah Saatnya, Tekstil Lokal Kembali Bangkit

SUMBER: IG PRIBADI



Nevi Zuairina

ANGGOTA Komisi VI DPR Nevi Zuairina mendukung kebijakan pelarangan impor barang bekas atau praktik thrifting. Langkah tersebut sangat krusial untuk melindungi industri tekstil dan pakaian jadi (TPT) nasional dari gempuran produk murah impor.

Nevi menilai, industri TPT memiliki peran strategis karena menyerap jutaan tenaga kerja dan menjadi salah satu penopang ekspor nasional. Keberlangsungan sektor ini berdampak pada pertumbuhan ekonomi, juga pada kesejahteraan masyarakat luas.

Data Kemenperin menunjukkan, subsektor tekstil tumbuh 5,90 persen dan pakaian jadi 2,64 persen pada kuartal I 2024. "Artinya, industri ini masih punya potensi besar untuk tumbuh jika mendapat perlindungan dan dukungan kebijakan yang tepat," ujar Nevi di Jakarta, Selasa (4/11/2025).

Namun di saat yang sama, maraknya impor barang bekas malah menggerus daya saing produk dalam negeri. Barang thrifting yang dijual murah di pasar-pasar rakyat menjadi substitusi langsung bagi produk lokal, sehingga menekan per-

mintaan terhadap hasil produksi pabrikan domestik.

"Banyak produsen garmen kecil sampai rumah tangga yang kehilangan pesanan, bahkan terancam gulung tikar karena serbuan pakaian bekas impor," jelas Politikus PKS itu.

Selanjutnya, kebijakan pelarangan thrifting tidak boleh berdiri sendiri. Pemerintah harus menjadikannya bagian dari paket kebijakan besar untuk revitalisasi industri TPT nasional, agar efeknya bisa dirasakan secara menyeluruh.

Larangan impor memang penting, tapi harus diiringi penguatan daya saing industri, peningkatan efisiensi produksi, dan inovasi produk. "Industri tekstil harus masuk ke era manufaktur 4.0 agar tidak kalah bersaing," tegasnya.

Dia mengingatkan, kebijakan transisi bagi pedagang kecil yang selama ini mengantungkan hidup pada perdagangan barang bekas juga wajib jadi perhatian serius. Pemerintah harus memberi ruang adaptasi yang adil agar kelompok ini tidak terdampak secara sosial dan ekonomi.

"Pemerintah harus hadir dengan program pelatihan, pembiayaan, atau dukungan untuk mereka agar bisa beralih ke produksi atau pengelolaan tekstil lokal," imbuhnya.

Dia meminta Pemerintah lebih memperhatikan jalur impor ilegal melalui koordinasi antar-kementerian dan lembaga, termasuk Bea Cukai, Kemendag, dan Kemenperin. Kebijakan ini akan efektif jika disertai dengan ekosistem industri sirkular, di mana barang bekas dalam negeri dapat dikelola dan diolah ulang menjadi produk bernilai tambah. ■ PYB